



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1148>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 495-511

Research Article

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan

Meta Rostiani¹, Rajaminsah², Andri Feriyansyah³, Cecep Badrudduja⁴

1. Universitas Islam Nusantara Bandung; metarostiani@gmail.com 
2. Universitas Islam Nusantara Bandung; rajaminsah60@gmail.com
3. Universitas Islam Nusantara Bandung; andriferiyansyah@gmail.com
4. Universitas Islam Nusantara Bandung; badrudduja.cecep@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 21, 2024
Accepted : July 07, 2024

Revised : May 12, 2024
Available online : October 29, 2024

How to Cite: Meta Rostiani, Rajaminsah, Andri Feriyansyah and Cecep Badrudduja (2024) "Educational Financing Management on the Quality of Vocational High Schools", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 495-511. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1148

Educational Financing Management on the Quality of Vocational High Schools

Abstract. This research aims to determine the Management of Educational Financing on the Quality of Vocational High Schools. This research was conducted against the background of the importance of financing management in vocational high schools on school quality. The general purpose of this study is to describe the management of education financing on the quality of vocational secondary schools. The specific objectives of this study are to describe: education financing management planning, organizing education financing management, implementing education financing management, and evaluating education financing management and accountability. This research method is descriptive

qualitative research. This research uses a library research approach. The results of this research indicate that vocational school principals are able to carry out optimal education financing management in terms of planning, organizing, implementing and evaluating/supervising educational financing. To achieve good school quality, education costs can be managed optimally and optimally.

Keywords: Education Financing Management, School Quality.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan. Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang pentingnya manajemen pembiayaan pada sekolah menengah kejuruan terhadap mutu atau kualitas sekolah. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menengah kejuruan. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: perencanaan manajemen pembiayaan pendidikan, pengorganisasian manajemen pembiayaan pendidikan, pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan, dan evaluasi manajemen pembiayaan pendidikan beserta pertanggung jawaban. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau library research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala SMK mampu melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara maksimal dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan pembiayaan pendidikan. Guna untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan mampu dikelola dengan optimal dan maksimal.

Kata Kunci: Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Mutu Sekolah

PENDAHULUAN

Manajemen adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk merancang pengelolaan sebuah organisasi atau sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada seorang pemimpin atau kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi dalam rangka memperbaiki kinerja. Manajemen Sekolah merubah sistem pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap pihak yang berkepentingan di tingkat lokal (local stakeholders). Menurut Supriono Subakir tujuan utama penerapan Manajemen adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah, dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri (Supriono, 2001; 5).

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 terdapat 8 standar nasional yang bertujuan untuk meningkatkan mutu suatu lembaga pendidikan. Berdasarkan peraturan pemerintah, salah satu dari delapan standar nasional pendidikan adalah standar pembiayaan. Pembiayaan pendidikan merupakan hal terpenting dan tidak terpisahkan dalam kegiatan pengelolaan pendidikan.

Mengutip pendapat dari E Mulyasa dalam buku Mohammad Rjii pembiayaan adalah suatu sumber keuangan yang dapat menunjang efektifitas dan efisienan dalam pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah salah satu sumber yang sangat berpotensi dalam menentukan kelancaran program kegiatan pendidikan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen pengelolaan pendidikan.

Matin menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun yang tidak berupa uang sebagai ungkapan rasa tanggung

jawab seluruh pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang diharapkan tercapai secara efektif dan efisien yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara dan dialokasikan, secara administratif sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien pula (Matin, 2014; 8). Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggung-jawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu penyusunan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), pemeriksaan (controlling).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menengah kejuruan. Dimana pembiayaan pendidikan adalah pengeluaran baik berupa uang atau jasa dalam pendidikan yang digunakan untuk menunjang proses jalannya pendidikan.

Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan biaya pendidikan haruslah berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, tranfaransi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian lembaga pendidikan perlu dikelola dengan sistem manajemen yang baik sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses pengalokasian seluruh sumber daya yang dimiliki pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu diperlukan manajemen pembiayaan yang benar, supaya dapat mendorong proses belajar mengajar dengan baik sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah.

Penyediaan dana pendidikan dan tanggung jawab pembiayaan pendidikan telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dalam UU No.20 tahun 2003 bab XIII pasal 46 ayat 1 tentang tanggung jawab pendanaan disebutkan bahwa: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Kemudian dalam pasal 47 ayat 1 dan 2 tentang sumber pendanaan pendidikan disebutkan bahwa: Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (RI, 2006).

Pendidikan memiliki fungsi dan potensi untuk melakukan berbagai persiapan menghadapi perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tuntutan era globalisasi. Fungsi pendidikan dalam rekayasa perubahan sosial inilah yang belum memperoleh perhatian yang memadai. Kultur adaptif masyarakat pasca modern, menantang untuk menyajikan setiap pendekatan dalam pendidikan yang bersifat interdisipliner, integralitis, serta fleksibilitas yang tinggi. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu sub pendidikan dalam peran dan fungsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam proses kegiatannya membutuhkan manajemen pendidikan yang efektif.

Upaya menyelenggarakan dan meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas tersebut, tidak hanya bertumpu pada manajemen yang baik tetapi juga

tergantung pada faktor pembiayaan. Pembiayaan merupakan komponen yang sangat penting, dan dapat dikatakan proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan anggaran.

Penelitian terdahulu berjudul manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menengah kejuruan, menyatakan hasil penelitiannya. Bahwa Manajemen pembiayaan pendidikan di SMK berada pada kategori sangat tinggi, artinya kepala sekolah pada SMK telah mampu melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara maksimal mulai dari perencanaan pembiayaan dan penganggaran, implementasi pembiayaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan pertanggung jawaban atau akuntabilitas. Rata-rata kecenderungan manajemen pembiayaan terhadap mutu pendidikan di SMK baik hanya pada tahap perencanaan sampai pertanggung jawaban. Tetapi pada tahap pelaksanaan beberapa kendala membuktikan masih perlu ditingkatkannya kembali. Pada tahapan implementasi pembiayaan pendidikan sehingga apa yang telah direncanakan menjadi pedoman dalam implementasinya. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pencapaian mutu pendidikan sebagai tujuan sekolah.

Kemudian penelitian terdahulu berjudul manajemen pembiayaan pendidikan (analisis konsep dan implikasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan) pada tahun 2020. Menyebutkan hasil penelitian, Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal terpenting dan utama. Untuk tercapainya pendidikan bermutu dibutuhkan pembiayaan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pembiayaan pendidikan harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada pernyataan di atas, masalah anggaran merupakan hal yang cukup mendasar. Seluruh komponen pendidikan erat kaitannya dengan komponen biaya, meskipun tidak sepenuhnya masalah biaya akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana, prasarana dan sumber belajar. Pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan anggaran (biaya) yang relatif besar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis mengangkat penelitian dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan (Nana, 2008; 60).

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011; 13). Penelitian Kepustakaan

(library research) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

Dalam penelitian kepustakaan (library research) sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Manajemen Pembiayaan

Kata Manajemen berasal dari kata Manage yang berarti mengurus, ada juga yang menggunakan istilah tata laksana, tetapi yang paling penting adalah apa makna yang terkandung dalam pengertian tersebut, jadi pada pokok utama pengertian Manajemen adalah mengurus, mengatur, membinan, memimpin supaya tujuan suatu usaha tercapai sesuai dengan yang diinginkan (Yaya, 2017; 1). Manajemen juga dapat dikatakan suatu proses untuk mengukir sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (Burhanudin, 2019; 52). Menurut pendapat George R. Terry yang dikutip oleh Usman Effendi menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Usman, 2014; 3).

Manajemen adalah suatu bentuk kerja. Dalam implementasinya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Menurut George R. Terry terdapat empat fungsi utama dalam manajemen (George, 2013; 17-18) yaitu:

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh anggota kelompok agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan di masa yang akan datang.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian meliputi : 1) pembagian komponen-komponen kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, 2) pembagian tugas kepada seorang manajer supaya mengadakan pengelompokan tersebut, 3) penetapan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

Fungsi pengorganisasian berhubungan erat dengan sumber daya manusia, sehingga penugasannya dalam unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur organizing.

c. Pelaksanaan (Actuating)

Actuating mencakup penetapan dan pemenuhan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memimpin, memberi penghargaan, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada para pegawai.

d. Pengendalian (Controlling)

Pengendalian mencakup kelanjutab tugas untuk melihat apakah kegiatan yang ada pada organisasi telah dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan juga dievaluasi agar tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.

Matin menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun yang tidak berupa uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab seluruh pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang diharapkan tercapai secara efektif dan efisien yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara dan dialokasikan, secara administratif sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien pula (Matin, 2014; 8). Pembiayaan pendidikan adalah pengeluaran baik berupa uang atau jasa dalam pendidikan yang digunakan untuk menunjang proses jalannya pendidikan. sumber biaya pendidikan berasal dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap pembangunan pendidikan agar dapat diperoleh pendidikan yang efektif dan efisien sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Pembiayaan merupakan faktor penting dalam pendidikan yang dialokasikan pada sistem pengelolaan secara administratif untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu baik bagi peserta didik maupun tenaga kependidikan.

Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan

Jenis-jenis biaya pendidikan menurut pendapat Anwar dalam buku Pratiwi Bernadetta dibedakan menjadi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost) (Pratiwi, 2020; 125):

a. Biaya langsung (direct cost)

Biaya langsung adalah pengeluaran dana secara langsung yang digunakan untuk membiayai proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung mengarah pada aspek dan proses pendidikan. Biaya pendidikan juga dapat dikatakan sebagai biaya yang secara langsung mengarah pada aspek dan proses pendidikan. Biaya rutin (recurrent cost). Biaya rutin adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, tenaga sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan sarana prasarana sekolah.

b. Biaya tidak langsung (indirect cost).

Biaya tidak langsung adalah biaya yang pada umumnya tidak secara langsung dapat menunjang proses pendidikan di sekolah. Biaya tidak langsung memiliki beberapa jenis antara lain: Biaya pribadi (private cost), Biaya masyarakat (social cost).

Sumber Pembiayaan Pendidikan

Sumber dana pendidikan adalah seluruh pihak yang memberikan bantuan dan sumbangan kepada lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi maupun dari masyarakat sendiri. Contoh sumber dana atau biaya yang berasal dari lembaga resmi adalah sumbangan dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), kemudian dari wali murid berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan dari masyarakat sekitar (Nanang, 2006; 113).

Sumber dana atau biaya pendidikan adalah seluruh biaya yang berasal dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

a. Sumber Dana Pemerintah

Sumber dana dari pemerintah pusat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai segala rutinitas kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan juga yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Selain itu terdapat bantuan dana dari pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana yang berasal dari pemerintah daerah berasal dari APBD tingkat kabupaten/kota. Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan untuk kegiatan dan pembangunan lembaga pendidikan. Pemerintah daerah juga memberikan bantuan dana berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS).

b. Sumber Dana Masyarakat

Sumber dana dari masyarakat berupa sumbangan yang berhubungan baik dari perseorangan maupun dari yayasan atau perusahaan yang ada di dalam maupun luar negeri yang mempunyai perhatian besar terhadap sektor pengembangan bidang pendidikan. Dana ini dapat dikatakan sangat efektif untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan, khususnya demi kelancaran pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga swasta.

c. Orang tua/ Wali murid

Selain pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat sumber biaya pendidikan juga diperoleh dari wali murid / orang tua. Pengualaran yang bersumber dari orang tua biasanya disebut dengan pembayaran infak dan SPP. Pengualaran keluarga pendidikan dasar banyak berbagai macam jenisnya.

Berikut merupakan jenis-jenis pengeluaran orang tua peserta didik untuk menunjang kegiatan pendidikan yang dipungut oleh sekolah:

1. Uang pangkal
2. Biaya sekolah perbulan/SPP
3. Biaya kegiatan ekstrakurikuler

4. Biaya operasional Pembangunan

Prinsip-prinsip Manajemen Pendidikan

Sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pengelolaan keuangan pendidikan dilandaskan pada asas keadilan, efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab publik. Berikut merupakan pedoman dalam penangan keuangan dan pembiayaan pendidikan:

a. Transparan

Transparansi yang ada di lembaga pendidikan menunjukkan bahwa administrasi keuangan lembaga pendidikan sifatnya terbuka, yaitu keterbukaan sumber dan jumlah keuangan, perincian penggunaan, serta akuntabilitas harus transparan sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dengan lebih mudah. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) merupakan contoh yang tidak asing bagi seluruh warga sekolah dan orang tua peserta didik.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan mengacu pada kemampuan untuk bertanggung jawab pada pemakaian biaya sekolah berdasarkan rancangan yang telah ditetapkan. Terdapat tiga kondisi mendasar yang digunakan untuk membangun akuntabilitas:

1. Para anggota peyelenggara lembaga pendidikan terbuka terhadap keuangan lembaga pendidikan.
2. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan standar kerja pada setiap lembaga pendidikan.
3. Masyarakat turut berpartisipasi untuk melayani

c. Efektifitas

Efektif ataupun tidak untuk pengelolaan keuangan bisa dilihat dari apakah semua kegiatan dapat tercukupi dananya dan apakah seluruh rencana kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan.

d. Efisiensi

Efisiensi terkait dengan jumlah hasil tujuan. Atau perbandingan daya dan hasil. Efisiensi menekankan pada jasa, pemikiran, waktu dan biaya. Efisiensi merupakan keseimbangan antara data masuk dengan data keluar yang biasa disebut dengan input dan output yang berkaitan dengan kuantitas hasil kegiatan (Haekal, 2022; 28-29).

Tujuan dan Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan menurut pendapat Tjandra, W.R (Undang, 2021; 7) yaitu:

- a. Meningkatkan penggalan sumber-sumber biaya yang ada di lembaga pendidikan.
- b. Menciptakan pengendalian yang tepat bagi sumber keuangan organisasi pendidikan.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga pendidikan.
- d. Melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan.

- e. Meminimalisir penyalahgunaan anggaran dana lembaga pendidikan.
- f. Mengatur berbagai macam dana yang ada dan dapat dimanfaatkan secara optimal guna menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan. Membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses dan memiliki sistem pengamanan yang dapat menghindari tindakan-tindakan yang tidak terpuji.
- g. Meningkatkan partisipasi stakeholders pendidikan.

Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan pendidikan memiliki kesamaan dengan manajemen pembiayaan, dan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan mempunyai tiga ruang lingkup yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai tiga fungsi pembiayaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yaitu:

a) Perencanaan

Pada setiap program memerlukan perencanaan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya program kegiatan tersebut. Perencanaan merupakan salah satu syarat bagi setiap kegiatan administrasi. Tanda adanya perencanaan atau planning, maka pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan pada awal kegiatan dan selama kegiatan administrasi tersebut berlangsung.

Tahapan yang dilakukan dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut (Ngalin, 1998; 15):

1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang akan dicapai.
2. Melakukan penelitian masalah atau kegiatan yang akan dilakukan
3. Mengumpulkan data dan beberapa informasi yang dibutuhkan.
4. Menentukan tahapan atau rangkaian tindakan.
5. Merumuskan bagaimana masalah tersebut akan dipecahkan dan bagaimana masalah kegiatan tersebut dapat terselesaikan.

Menurut Morphet dalam Undang Ruslan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan (Undang, 2021; 33) adalah:

1. Anggaran belanja pendidikan harus dapat mengganti beberapa peraturan yang tidak efektif sesuai dengan peraturan dan prosedur kebutuhan pendidikan pada saat ini.
2. Merevisi peraturan dan input lainnya secara relevan, dengan merancang pengembangan sistem pendidikan pada saat ini.
3. Memonitor rencana dan menilai kekurangan pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan pada tahap berikutnya.

Perencanaan dalam pembiayaan pendidikan berbasis sekolah setidaknya meliputi dua aktivitas yaitu sistematisasi anggaran dan pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Kedua aktivitas tersebut dijabarkan sebagaimana berikut ini:

1. Sistematika penyusunan anggaran Pendidikan

Anggaran yaitu rancangan operasional yang dibuktikan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang, dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan instansi pada jangka waktu tertentu. Sistematika anggaran merupakan penggambaran terhadap aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh instansi pendidikan sehingga dapat diketahui ketentuan biaya pada setiap kegiatannya (T. Hani, 2009; 167). Anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan, pengontrolan juga sebagai alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Selain anggaran mempunyai masalah atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis sebagai alat penafsir, alat kewenangan dan alat efisiensi. Implementasi ini sesuai dengan pandangan bahwa anggaran biaya berperan sebagai alat untuk perencanaan, pelaksanaan, dan sebagai alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan.

2. Pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

Proses pengembangan RKAS pada umumnya melewati tahap-tahap pendekatan prosedur sebagai berikut: Pada tingkatan kelompok kerja dibentuk sekolah yang terdiri dari para pembantu kepala sekolah yang mempunyai peran diantaranya melaksanakan identifikasi kepentingan-kepentingan biaya yang harus dikeluarkan setelahnya digolongkan menurut dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilaksanakan, seleksi alokasi yang ditaksir sangat mendesak dan tidak dapat dikurangi, maelainkan ketika rencana tersebut tidak menghambat kelancaran proses pendidikan terlebih proses belajar mengajar, maka bisa dilaksanakan penyusunan biaya selaras dengan dana yang ada (Dinas, 2003; 116).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme dalam pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara efektif dan efisien (Sherly, 2020; 132). Secara umum dalam pendidikan, sistem pembiayaan atau keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua aktivitas yaitu pendapatan (income) dan pengeluaran atau pemakaian (output).

c. Evaluasi

Seluruh kegiatan evaluasi anggaran ditulis dalam sebuah laporan keuangan. laporan keuangan penggunaan anggaran pendidikan merupakan bagian dari sistem pengawasan yang memuat hasil-hasil pelaksanaan rencana dan program pendidikan, masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang dihadapi, dan alternatif-alternatif yang digunakan untuk mengatasi permasalahan. Pelaporan penggunaan anggaran pendidikan merupakan bagian dari sistem pengawasan yang memuat hasil-hasil pelaksanaan rencana dan program pendidikan, masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang dihadapi, dan alternatif-alternatif yang digunakan untuk mengatasi permasalahan.

Mutu Sekolah Menengah Kejuruan

Menurut pendapat Joseph & Berk dalam buku yang ditulis oleh Murniati A.R, dkk mendefinisikan mutu sebagai: 1. Landasan terpenuhinya harapan dan persyaratan sebuah produk. 2. Mutu merupakan karakteristik yang dapat diukur baik dari segi kuantitas maupun wujud yang akan disajikan. Sedangkan menurut pendapat Goetsh & Davis menyatakan bahwa kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, layanan, personel, proses, dan lingkungan yang telah memenuhi harapan (Murniati, 2021; 132).

Sesuai dengan pandangan Fattah & Ali dalam buku Murniati mutu pendidikan memiliki ciri khas yang unik, karena pendidikan bukan bagian dari dunia industri yang menyediakan produk atau dalam bentuk benda, tetapi produk pendidikan lebih berupa dalam pelayanan. Layanan tersebut yang akan diberikan kepada pengguna jasa pendidikan. Ciri-ciri dari mutu layanan pendidikan dapat dikatakan sebagai berikut (Ibid):

- a. Mutu pelayanan pendidikan harus memiliki rasa kepercayaan (reliability) yang tinggi terutama kepercayaan yang berkaitan dengan waktu.
- b. Menjamin bahwa pelayanan pendidikan dapat memberikan jaminan kualitas bagi para pengguna jasa.
- c. Pelayanan pendidikan harus memadai yang diperuntukkan bagi peserta didik.
- d. Mutu layanan pendidikan harus bersifat responsif terhadap pelayanan yang dibutuhkan peserta didik.
- e. Memberikan kemudahan pada akses pelayanan pendidikan.

Pendidikan yang bermutu merupakan harapan bagi seluruh masyarakat, hal ini berkaitan dengan pengalaman yang menunjukkan bahwa modal dalam menghadapi perkembangan zaman adalah pendidikan. Karena pendidikan dapat mengupayakan kebutuhan dan harapan-harapan bagi peserta didik. pendidikan sebagai sebuah investasi, pendidikan juga sebagai kegiatan dinamis dan penuh tantangan yang menyangkut kepentingan semua orang. Oleh sebab itu, pemberian layanan pendidikan yang bermutu merupakan hal yang harus diberikan bagi pengguna jasa pendidikan (Nasir, 2019; 202).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan menengah yang secara khusus mempersiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga kerja yang terampil, terdidik dan profesional, serta mampu mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung kelancaran kegiatan sekolah tentunya membutuhkan biaya yang memadai dengan besarannya lebih banyak bila dibandingkan dengan kebutuhan sekolah menengah umum lainnya. Adapun sumber pembiayaannya antara lain dari: pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan sumber lain yang berasal dari dana hibah, pinjaman, dan dana unit produksi.

Pembiayaan pada SMK pasca pemberlakuan otonomi daerah tidak seperti sentralisasi di mana kebutuhan akan operasional sekolah semua dapat terpenuhi baik dalam hal ketersediaan bahan pembelajaran seperti bahan praktek peserta didik pada perbengkelan maupun biaya perawatan dan pemeliharaan alat.

Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah pencapaian visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pengorganisasian pembiayaan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan evaluasi atau pengawasan pembiayaan pendidikan.

1. Perencanaan Manajemen Pembiayaan Sekolah Menengah Kejuruan

Perencanaan pembiayaan lembaga pendidikan SMK memerlukan data yang akurat sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran. Untuk mengefektifkan penyusunan rencana anggaran, kepala sekolah adalah top manager yang bertanggung jawab sebagai pelaksana. Kepala sekolah harus mampu menerjemahkan program-program pendidikan ke dalam ekuivalensi biaya penyusunan RAPBS.

Perencanaan anggaran adalah merencanakan kegiatan untuk masa yang akan datang dan berapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan. Yang dimaksud menggali sumber dana, menghimpun, juga menjabarkan ke dalam kegiatan yang telah terprogram demi pencapaian suatu tujuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Mulyono (2010:159) sebagai berikut: Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan.

Perencanaan pembiayaan sekolah memerlukan data yang akurat sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk yang akan datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran. Upaya mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan sekolah yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah Kepala sekolah. Posisi Kepala sekolah sebagai top manager harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk mengaplikasi program pendidikan ke dalam ekuivalensi biaya merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran belanja bukan pekerjaan rutin atau mekanis, melibatkan pertimbangan tentang maksud dasar dari pendidikan dan program yang ada di sekolah.

Berpijak pada rumit perencanaan dan pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan, perlunya melibatkan tim penyusun anggaran, sehingga RAPBS yang disusun sesuai menurut aspirasi dan kebutuhan internal sekolah menengah kejuruan (SMK) serta masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Ternyata meskipun pihak SMK mengusulkan rancangan anggaran belanja, sekolah tidak mengelola sepenuhnya masalah keuangan. Karena ada masalah penganggaran tertentu yang ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan. Manajemen anggaran

pada SMK menganut sistem sentralistik dan desentralistik, di mana tidak semua sumber dana diatur oleh pihak Dinas Pendidikan. Sumber keuangan sekolah menyatakan sebagai berikut: Sumber keuangan dan pembiayaan suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, uang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, (2) orang tua atau peserta didik, (3) masyarakat, baik mengikat atau tidak mengikat. (Mulyono, 2010:160)

2. Pengorganisasian Manajemen Pembiayaan Sekolah Menengah Kejuruan

Dalam pengorganisasi manajemen pembiayaan menganut azas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggung jawaban (Bakrum, 2019; 36).

Kepala sekolah berfungsi sebagai pemberi wewenang dan dilimpah fungsi melakukan pengujian dan memerintahkan atas pembayaran. Tetapi tidak dibenarkan melaksakan fungsi bendahara karena berkewajiban melakukan pengawasan. Bendahara disamping berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran juga dilimpah fungsi berwenang melakukan pengujian dan memerintah untuk menguji hal atas pembayaran. Maka kepala sekolah maupun bendahara perlu memperhatikan asas-asas umum penatausahaan keuangan SMK.

Sumber pembiayaan yang diperoleh SMK beragam, ada yang murni dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan iuran dari masyarakat berupa SPP, bagi sekolah yang tidak mau menerima BOS. Dana tersebut memiliki aturan baku yang dibuat oleh pemerintah guna mengalokasikan dana. Hal ini pula yang menuntut kepala sekolah selaku pengambil keputusan harus dapat melakukan fungsi manajemennya terhadap pembiayaan sekolah secara optimal.

3. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Sekolah Menengah Kejuruan

Dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pengelolaan keuangan SMK, kepala sekolah memiliki beberapa peran diantaranya:

a. Bertanggung jawab dalam:

- 1) Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data terkait. Jika jumlah dana yang diterima tidak sesuai maka harus segera memberitahukan ke tim manajemen yang bersangkutan.
- 2) Bagi semua sekolah termasuk SMK harus mengidentifikasi peserta didik miskin dan membebaskan dari segala iuran.
- 3) Mengelola dana yang diterima sekolah, secara bertanggung jawab dan transparan

- 4) Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana, di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua komite sekolah.
 - 5) Membuat laporan bulanan pengeluaran dana dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara, dan ketua komite.
 - 6) Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah tersebut di papan pengumuman setiap 3 bulan Pendataan dan pelaporan pelaksanaan keuangan pendidikan SMK meliputi identifikasi dan pengukuran data keuangan, pencatatan dan pengklasifikasian data keuangan, dan pelaporan data keuangan.
4. Evaluasi Manajemen Pembiayaan Sekolah Menengah Kejuruan

Evaluasi manajemen disini merupakan suatu pengawasan. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan di lingkungannya (Nawawi, 2006:115).

Pengawasan pada dasarnya tidak hanya terkait dengan pelaporan, melainkan pengajuan tindakan untuk mengendalikan ke arah tujuan yang akan dicapai. Pemeriksaan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan maupun menentukan prosedur dalam mengimplementasikan anggaran. Istilah yang sering digunakan dalam pendidikan adalah supervisi. Melalui proses pengawasan dapat dilakukan upaya membimbing, membantu mengatasi kesulitan, dan bukan mencari kesalahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan telah didapatkan bahwa SMK Swasta lebih unggul dalam prinsip Manajemen pembiayaan berbasis sekolah hal tersebut dapat terjadi karena SMK Swasta dalam hal pembiayaan mendapatkan donatur, kerjasama dengan industri dan bantuan pemerintah, tetapi tidak semua SMK Swasta dapat memanfaatkan dan mendapatkan hal tersebut karena masih banyak SMK Swasta yang tidak dapat mendapatkannya.

Manajemen pembiayaan dilaksanakan dengan memberikan subsidi kepada siswa, mengatur pembiayaan secara rinci dan benar, memiliki laporan keuangan yang jelas, dan melaporkan kepada masyarakat sekolah dengan transparan. Untuk mengatasi hal tersebut SMK Negeri dan Swasta dapat melakukan perubahan dengan cara SMK Negeri dan Swasta harus melaporkan dana sekecil apapun dalam pembukuan dan melakukan laporan dengan serinci mungkin, sekolah memperhitungkan nilai beban yang akan diberikan kepada siswa dengan melaksanakan rapat komite dan wali murid, sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik, memiliki laporan yang jelas, memiliki laporan yang dapat diakses oleh wali murid dan warga sekolah. Karena pembiayaan merupakan hal yang sangat sensitif dan menyangkut orang banyak.

Pada penelitian sebelumnya, temuan yang diperoleh dari hasil analisis data penelitian pada Mutu Sekolah di SMK menggambarkan hasil rata-rata sebesar 4,63 yang berada pada kategori sangat tinggi. Hal tersebut tergambar dari skor rata-rata

dimensi Mutu Kurikulum sebesar 5.00, Mutu peserta didik sebesar 4.32, Mutu Pendidik sebesar 4.70, Lingkungan kerja sebesar 4.84, disiplin sekolah sebesar 4.56, ketersediaan sumber belajar sebesar 4.56, partisipasi orang tua sebesar 4.72 dan satuanbiaya sebesar 4.72.

Skor rata-rata dimensi mutu kurikulum lebih tinggi dari pada dimensi lainnya. Sedangkan dimensi yang terendah adalah mutu peserta didik. Hal ini menggambarkan Skor rata-rata dimensi mutu kurikulum lebih tinggi dari pada dimensi lainnya. Sedangkan dimensi yang terendah adalah mutu peserta didik. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan mutu kurikulum di SMK telah sesuai dengan yang kurikulum yang dibuat telah mengacu pada kurikulum pusat, serta kurikulum yang dikembangkan disekolah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pada penelitian sebelumnya menyebutkan analisis korelasi didukung oleh hasil analisis koefisien determinasi yang menggambarkan besarnya pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah pada SMK sebesar 58,7% sedangkan 41,3% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kurikulum, manajemen sekolah, fasilitas, guru, peserta didik, masyarakat, dan kultur sekolah.

Pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah ditunjukkan dalam persamaan:

Harga 35,905 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa jika tidak ada keterlibatan sama sekali dari manajemen pembiayaan pendidikan, maka mutu sekolah sebesar 35,905, sedangkan harga 0,754 merupakan regresi yang menunjukkan bahwa setiap adanya kenaikan manajemen pembiayaan pendidikan sebesar 1, maka akan ada kenaikan nilai mutu sekolah sebesar 0,754. Dan setiap adanya kenaikan manajemen pembiayaan pendidikan 10, maka akan diikuti kenaikan mutu sekolah sebesar 7,54. (Dedy; 267).

Dengan adanya temuan tersebut, terbukti bahwa manajemen pembiayaan pendidikan secara signifikan memberikan pengaruh terhadap mutu sekolah pada SMK. Menurut hasil perhitungan analisis koefisien determinasi, manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah sebesar 58,7%. Artinya manajemen pembiayaan pendidikan yang lebih tinggi kemungkinan dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dari 58,7% terhadap peningkatan mutu sekolah pada SMK. (Dedy; 267).

Dalam menunjang peningkatan mutu sekolah menengah kejuruan, manajemen pembiayaan pendidikan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan sehingga menunjang peningkatan mutu sekolah. Berdasarkan penelitian pada 32 sekolah dengan sumber pembiayaan dari dana BOS memiliki mutu sekolah yang kecenderungan rata-ratanya sangat tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan diperlukan peran serta pembiayaan pendidikan. Dana penyelenggaraan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Manajemen pembiayaan pendidikan di SMK berada pada kategori sangat tinggi, artinya kepala sekolah pada SMK telah mampu melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara maksimal dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan pembiayaan pendidikan. Melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara maksimal mulai dari perencanaan pembiayaan dan penganggaran, implementasi pembiayaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan pertanggung jawaban atau akuntabilitas. Kecenderungan pada ke-empat dimensi ini maka diperoleh nilai terendah yakni pada dimensi implementasi pelaksanaan pembiayaan. Hal ini terjadi salah satunya karena kurangnya peran serta orang tua siswa atau masyarakat baik dari sumbangan materil, tenaga, maupun dalam pelibatan pengambilan keputusan untuk program- program sekolah.

Pengaruh yang diberikan oleh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu pendidikan di SMK berada pada kategori kuat. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan manajemen pembiayaan yang baik, maka akan mampu meningkatkan mutu sekolah. Rata-rata kecenderungan manajemen pembiayaan terhadap mutu pendidikan di SMK sudah pada kategori yang sangat baik pada tahap perencanaan sampai pertanggung jawab pembiayaan. Meskipun pada pelaksanaannya di lapang masih belumsesuai dengan pencapaian standar nasional pendidikan. Hal tersebut terbukti dengan penggunaan anggaran yang sesuai dari setiap alokasi yang diberikan pemerintah, serta kesesuaian dengan perencanaan yang dibuat oleh sekolah dalam bentuk RKAS. Namun, beberapa kendala membuktikan masih perlu ditingkatkannya kembali pada tahapan implementasi pembiayaan pendidikan sehingga apa yang telah direncanakan menjadi pedoman dalam implemantasinya. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pencapaian mutu pendidikan sebagai tujuan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakrun, M (2019) Manajemen keuangan SMK. Manual. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta.
- Burhanudin Gesi, Manajemen dan Eksekutif, Jurnal Manajemen, Vol.3 No.2, 2019, hlm.52.
- Dedy Achmad Kurniady, dkk. Manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menengah kejuruan. hlm 267
- Dinas Pendidikan, Pedoman Manajemen, (Bandung: Direktorat Kelembagaan Agama Sekolah,2003), hlm.116
- George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 17- 18
- Haekal, M Muhsin, Irfan Yusuf, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam, (Bandung: CV Media Sains Indonesia,2022) Ibid.,134-135
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8
- Mohamad Rojii, Priyo Nurdiyan, An'nur Ridwan P, Manajemen Pembiayaan

- Pendidikan Islam, (Sidoarjo: Umsida Press), hlm. 1
- Mulyono, 2010. Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Murniati A.R, dkk, Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Kejuruan, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm. 132
- Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Cet. IV, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008)
- Nanang fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 113
- Nanang Fattah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah, (Bandung: C.V. Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Nasir Usman dan Murniati A.R, Pegantar Manajemen Pendidikan, (Tangerang: Animage, 2019), hlm.202
- Nawawi, H., 2006. Manajemen Strategik Organisasi NonProfit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 115
- Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.15
- Nurhayati dkk, Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, (Surabaya: Global Aksara Pers), hlm. 03
- Pratiwi Bernadetta Purba, Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 125
- Sherly, Leni Nurhayati, Hery Yanto, dkk, Manajemen Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktis, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), hlm. 132
- Supriono Subakir dan Achmad Sapari, Manajemen Berbasis Sekolah, (Surabaya: SIC, 2001)
- Undang Ruslan Wahyudin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm 7
- Undang Ruslan Wahyudin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akhuntabilitas), (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm.33
- T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: Balai Pustaka Fakultas Ekonomi, 2009), hlm.167
- Usman Effendi, Asas Manajemen, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 3 Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus, (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017), hlm 1